

Tantangan dan Strategi Penguatan Ketahanan Sosial berbasis Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Terpencil Suku Asmat

Rotua Siringoringo

Universitas Cenderawasih, rotuaringo21@gmail.com

Dr. Drs. Urip Wahyudin, M.Si

Universitas Cenderawasih, wahyudinkaliacai@gmail.com

Eka Nurwahyuliningsih

Universitas Cenderawasih, Ekanurwahyu19@gmail.com

Abstract:

This study examines the social resilience of the Asmat people in Papua, whose lives are deeply rooted in ecological bonds, local wisdom, and community solidarity. While their cultural identity and subsistence practices based on forests and swamps serve as the foundation of daily life, the Asmat face multidimensional challenges, including economic vulnerability, limited access to health and education services, as well as constraints in transportation and communication. This research applies a literature study approach by reviewing relevant scholarly articles, books, and research reports. The findings reveal that reliance on a subsistence economy renders the community highly vulnerable to climate change, environmental degradation, and limited market access. In health, the shortage of medical personnel, inadequate facilities, and poor access to clean water significantly reduce quality of life. In education, the lack of schools and teachers hampers school participation and the development of life skills among younger generations. Nevertheless, opportunities for strengthening social resilience can be pursued through livelihood diversification based on local potential, small-scale livestock and community-based fisheries, improvement of transportation and communication infrastructure, and the enhancement of basic services. This study emphasizes the need for development strategies that are inclusive, participatory, and contextually adapted to indigenous communities, ensuring that the social resilience of the Asmat can be both preserved and sustainably strengthened.

Keywords:

Social Resilience, Asmat Community, Local Wisdom, Inclusive Development, Social Welfare

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji ketahanan sosial masyarakat Asmat di Papua yang hidup dalam keterhubungan erat dengan alam, kearifan lokal, dan solidaritas komunitas. Meskipun identitas budaya dan praktik subsisten berbasis hutan dan rawa menjadi fondasi kehidupan, masyarakat Asmat menghadapi tantangan multidimensional, meliputi kerentanan ekonomi, keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, transportasi, serta komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur melalui telaah artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem ekonomi subsisten menyebabkan masyarakat rentan terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keterbatasan pasar. Di bidang kesehatan, minimnya tenaga medis, sarana layanan, serta akses air bersih memperburuk kualitas hidup. Di bidang pendidikan, keterbatasan sarana dan tenaga pendidik menghambat partisipasi sekolah dan pengembangan kecakapan hidup generasi muda. Meski demikian, peluang penguatan ketahanan sosial dapat dilakukan melalui diversifikasi penghidupan berbasis potensi lokal, pengembangan peternakan dan perikanan komunitas, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi, serta penguatan layanan dasar. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual dengan kondisi masyarakat adat, agar ketahanan sosial Asmat dapat dipertahankan sekaligus diperkuat secara berkelanjutan.

Kata kunci:

Ketahanan Sosial, Masyarakat Asmat, Kearifan Lokal, Pembangunan Inklusif, Kesejahteraan Sosial

Pendahuluan

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sekaligus memiliki keragaman budaya yang tinggi. Masyarakat Asmat, yang menetap di wilayah pesisir dan pedalaman Papua, dikenal sebagai komunitas adat dengan kehidupan yang sangat bergantung pada alam. Identitas mereka sebagai “manusia kayu” mencerminkan keterikatan mendalam terhadap lingkungan hidup, yang diwujudkan melalui seni ukir sebagai representasi spiritual dan hubungan dengan leluhur (Anggraheni & Prasodjo, 2023). Dalam kesehariannya, masyarakat Asmat memanfaatkan sagu, hasil hutan, serta ekosistem rawa dan sungai sebagai sumber pangan sekaligus bagian dari ritus budaya (Ellen, 2020; Kamma, 2011). Dengan demikian, hubungan mutualistik antara masyarakat Asmat dan alam sekitarnya menjadi fondasi utama ketahanan sosial mereka.

Konsep ketahanan sosial sendiri merujuk pada kemampuan komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan mengembangkan strategi kolektif menghadapi tekanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Adger, 2000; Keck & Sakdapolrak, 2013). Pada masyarakat adat seperti Asmat, ketahanan sosial tercermin dalam praktik solidaritas sosial, kearifan lokal, serta sistem kepercayaan yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. Pamungkas (2018) menegaskan bahwa ketahanan sosial masyarakat Asmat sangat dipengaruhi oleh keterhubungan mereka dengan habitat ekologisnya. Jika keterhubungan ini terganggu, misalnya akibat kerusakan lingkungan atau intervensi pembangunan yang tidak sesuai konteks, maka bukan hanya ketahanan ekonomi yang terancam, tetapi juga kohesi sosial dan identitas budaya.

Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Asmat masih diwarnai oleh berbagai keterbatasan mendasar. Dari sisi ekonomi, masyarakat sangat bergantung pada hasil alam, terutama sagu, yang meski berfungsi sebagai pangan pokok dan simbol budaya, tidak memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan karena terbatasnya akses pasar (Rumbewas & Handoyo, 2020). Selain itu, tingkat kemiskinan di Papua, termasuk Asmat, masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, mencapai 26,03%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,36% (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat adat.

Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi juga menjadi masalah serius. Laporan UNICEF Indonesia (2021) menyebutkan bahwa banyak wilayah pedalaman Papua masih menghadapi keterbatasan sarana air minum layak dan sanitasi sehat, termasuk di Kabupaten Asmat. Situasi ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit, terutama bagi anak-anak (Soewondo, 2021). Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya di wilayah terpencil.

Selain itu, persoalan transportasi turut memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Asmat. Faktor geografis berupa rawa dan sungai membuat akses transportasi darat hampir tidak mungkin. Sebagian besar mobilitas bergantung pada jalur sungai atau laut dengan perahu bermotor, yang tidak hanya mahal tetapi juga berisiko tinggi. Kondisi ini menghambat distribusi barang, akses ke fasilitas kesehatan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas (Widjojo, 2013; Yoman, 2019).

Bidang pendidikan pun menghadapi tantangan berat. Rendahnya jumlah tenaga pengajar, keterbatasan sarana prasarana sekolah, serta jauhnya jarak dari pemukiman ke sekolah menjadi penghalang bagi generasi muda Asmat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Susanti (2020) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini membuat kualitas sumber daya manusia di Asmat terhambat, yang pada akhirnya memperlemah ketahanan sosial jangka panjang.

Ironisnya, berbagai program pembangunan pemerintah kerap lebih berorientasi pada proyek infrastruktur skala besar, seperti jalan raya dan jembatan di daerah tertentu, yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang hidup di wilayah rawa dan sungai (Mboeik, 2021; Widjojo, 2013). Alih-alih memperkuat akses dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan, pembangunan di Papua cenderung terjebak pada pendekatan top-down yang kurang mempertimbangkan kearifan lokal. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan dan realitas sosial masyarakat Asmat.

Dengan demikian, terdapat paradoks dalam kehidupan masyarakat Asmat: di satu sisi mereka memiliki ketahanan sosial berbasis kearifan lokal dan keterhubungan ekologis; namun di sisi lain, ketahanan tersebut rentan melemah karena minimnya dukungan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi ini mendesak untuk dikaji melalui studi literatur, agar dapat dipahami bagaimana masyarakat Asmat mempertahankan ketahanan sosialnya sekaligus bagaimana pemerintah seharusnya menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual. Studi ini tidak hanya penting bagi pengembangan literatur akademik tentang masyarakat adat dan ketahanan sosial, tetapi juga relevan sebagai kritik konstruktif terhadap praktik pembangunan di Papua yang selama ini masih menimbulkan kesenjangan sosial.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi literatur sebagai dasar analisis. Sebelum penyusunan naskah, dilakukan penelusuran terhadap publikasi-publikasi sebelumnya yang menyoroti penyelenggaraan pendidikan inklusif. Studi literatur mencakup berbagai ulasan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan ilmiah sesuai dengan temuan penulis sebelumnya (Hermawan, 2019). Selanjutnya, penulis menyaring dan memilih sumber-sumber yang relevan dengan topik

untuk kemudian dijadikan acuan dalam penulisan ini. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan melalui telaah berbagai referensi, meliputi artikel ilmiah bereputasi, buku, serta laporan penelitian baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber informasi lain yang dianggap relevan dengan fokus kajian. Basis data yang digunakan dalam penelusuran antara lain Google Scholar, ResearchGate, Open Access Repository. Seluruh referensi yang diperoleh dimanfaatkan untuk memperkuat pembahasan terkait tantangan dan strategi penguatan ketahanan sosial berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil.

Hasil Penelitian

Ketergantungan pada Ekonomi Subsistens dan Tantangan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Asmat

Sebagian besar masyarakat Asmat masih hidup dalam sistem ekonomi subsisten yang sangat bergantung pada sumber daya alam hutan dan rawa. Sagu (*Metroxylon sagu*), ulat sagu (tao), kasuari (toaut), ikan, dan kepiting (karaka) menjadi sumber konsumsi utama sehari-hari. Pola ini tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sarat dengan nilai spiritual, karena alam dipandang sebagai "ibu" yang memberi kehidupan (Wikipedia, t.t.). Namun, ketergantungan tunggal pada hasil alam menjadikan ketahanan ekonomi rapuh. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, hingga alih fungsi hutan telah terbukti memperburuk ketersediaan pangan lokal serta meningkatkan risiko gizi buruk di wilayah Asmat (Kompas, 2018). Temuan ini sejalan dengan kajian Wambrauw & Suharno (2019) yang menunjukkan bahwa masyarakat Papua dengan basis ekonomi subsisten sangat rentan terhadap perubahan ekosistem karena lemahnya diversifikasi penghidupan.

Keterbatasan pengetahuan teknis, minimnya keterampilan dalam budidaya, dan rendahnya partisipasi dalam program ekonomi modern membuat masyarakat sulit mengembangkan usaha yang bernilai tambah. Orientasi hidup subsisten juga membuat mereka cenderung fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada membangun modal atau investasi jangka panjang (ResearchGate, 2018). Kondisi ini konsisten dengan hasil studi Susanti & Kurniawan (2020), yang menegaskan bahwa rendahnya kapasitas teknis dan pendidikan formal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menjadi hambatan utama bagi transformasi ekonomi lokal.

Di sisi lain, fasilitas produksi yang tersedia masih sangat sederhana. Aktivitas bercocok tanam maupun mengolah hasil alam banyak dilakukan dengan peralatan tradisional turun-temurun. Walaupun bernilai budaya, keterbatasan ini membatasi produktivitas serta membuat hasil panen tidak mampu bersaing dengan produk dari daerah lain yang sudah mengadopsi teknologi modern. Hasil penelitian Rumatora (2021) menegaskan bahwa keterbatasan sarana produksi menjadi salah satu penyebab utama stagnasi ekonomi rumah tangga di Papua, terutama di wilayah pedalaman.

Tantangan semakin berat karena keterpencilan geografis Asmat. Jarak ke pusat distrik sangat jauh dan hanya dapat ditempuh melalui jalur sungai atau darat yang memakan waktu lama. Biaya logistik sangat tinggi, misalnya harga bahan bakar yang mencapai sekitar Rp18.000 per liter, membuat pendapatan dari hasil jual sering tidak sebanding dengan biaya transportasi. Kondisi serupa diidentifikasi dalam studi Lestari & Mambri (2022) yang menemukan bahwa infrastruktur transportasi dan biaya distribusi yang mahal menjadi faktor penghambat utama integrasi pasar di Papua. Akibatnya, sebagian besar hasil tangkapan dan panen hanya dikonsumsi sendiri, bukan untuk dipasarkan secara komersial, sekaligus menghambat masuknya investasi swasta karena minimnya infrastruktur dan insentif ekonomi.

Diversifikasi Penghidupan sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Masyarakat Asmat

Menghadapi tantangan tersebut, penguatan ekonomi masyarakat Asmat perlu diarahkan pada diversifikasi penghidupan yang berbasis lokal, dengan strategi sebagai berikut:

1. Budidaya tanaman keras dan pangan lokal

Pengembangan kelapa, pinang, serta pohon buah lokal dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang, sedangkan tanaman pangan seperti ubi-ubian, jagung, dan sayuran membantu memperkuat ketahanan pangan. Dari perspektif kesejahteraan sosial, ketersediaan pangan bergizi berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak, untuk hidup sehat dan terbebas dari malnutrisi. Studi menunjukkan bahwa diversifikasi pangan lokal berkontribusi pada penurunan risiko gizi buruk dan meningkatkan ketahanan komunitas (Rachman dkk., 2020).

2. Peternakan skala kecil

Pemeliharaan ayam kampung, babi, atau itik relatif mudah dilakukan dan sesuai dengan konteks sosial-budaya Asmat. Program ini juga sudah dicoba oleh Kementerian Sosial melalui pembangunan peternakan ayam di Distrik Amagais (Antaranews.com, 2025). Dari sisi kesejahteraan sosial, peternakan skala kecil memperkuat ekonomi rumah tangga sekaligus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), karena membuka peluang kerja di tingkat komunitas (Sumardjo & Sadono, 2019).

3. Perikanan air tawar dan payau

Pemanfaatan sungai dan rawa untuk perikanan dapat menambah sumber protein sekaligus peluang ekonomi. Model inovasi seperti Kebun Gizi Apung, yang terbukti meningkatkan asupan gizi anak melalui hortikultura lokal (Antaranews.com, 2023), dapat direplikasi dalam bentuk kolaborasi perikanan berbasis komunitas. Strategi ini sejalan dengan prinsip ekologi sosial dalam kesejahteraan sosial, yakni menghubungkan potensi lingkungan dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (Supriyanto, 2018).

4. Peningkatan sarana produksi dan teknologi sederhana

Pengadaan alat produksi pertanian, perikanan, maupun pengolahan hasil hutan yang lebih modern perlu dipadukan dengan pelatihan teknis. Agar efektif, model seperti koperasi peralatan atau unit usaha bersama dapat dikembangkan sehingga masyarakat memiliki akses kolektif terhadap fasilitas. Dalam kerangka kesejahteraan sosial, penyediaan alat bukan sekadar soal produktivitas, melainkan juga bagian dari penguatan kapasitas (*capacity building*) masyarakat agar lebih mandiri (Nugroho & Wulandari, 2021).

5. Penguatan akses pasar dan logistik

Pemerintah dan swasta perlu menyediakan subsidi transportasi atau jalur distribusi yang lebih efisien untuk menekan biaya logistik. Dari perspektif kesejahteraan sosial, hal ini berarti memperluas akses masyarakat terhadap pasar dan jaringan ekonomi, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktor aktif dalam rantai ekonomi yang lebih luas (Hikmat, 2019).

Melalui strategi tersebut, diversifikasi penghidupan masyarakat Asmat tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memiliki relevansi kuat dengan ilmu kesejahteraan sosial. Diversifikasi dipandang sebagai bentuk intervensi sosial untuk mengurangi deprivasi multidimensional—mencakup kekurangan pangan, rendahnya kesehatan, keterbatasan pendidikan, dan minimnya peluang ekonomi. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal, strategi ini berpotensi memperkuat ketahanan sosial-ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Asmat.

Tantangan Ketahanan Sosial di Bidang Kesehatan dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Ketahanan sosial masyarakat pada bidang kesehatan di wilayah ini masih dihadapkan pada serangkaian tantangan yang saling berkelindan dan mempengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, yang berakar dari minimnya pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya kesehatan, membuat masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Kebiasaan yang kurang mendukung kesehatan ini diperparah oleh keterbatasan sarana layanan medis, di mana Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi tumpuan masyarakat kekurangan tenaga kesehatan terlatih, peralatan medis yang memadai, serta pasokan obat-obatan yang cukup. Obat-obatan yang tersedia pun sering kali terbatas jenis dan jumlahnya, dengan harga yang relatif mahal serta distribusi yang jauh dan sulit diakses, sehingga memperlambat penanganan penyakit dan meningkatkan risiko komplikasi.

Di luar itu, fasilitas kesehatan di kampung terdekat juga belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan sarana sanitasi dasar seperti MCK rumah tangga masih rendah, sementara akses terhadap air bersih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini memicu tingginya kasus penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tifoid, kolera, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan. Upaya untuk memanfaatkan potensi lokal melalui pengembangan apotek hidup yang dapat menyediakan tanaman obat keluarga belum berjalan optimal, padahal langkah ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimia yang mahal dan sulit diperoleh.

Keterbatasan tersebut semakin diperparah oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, yang membuat mereka sulit membiayai transportasi menuju fasilitas kesehatan, membeli obat, atau mendapatkan perawatan medis yang memadai. Akibatnya, banyak warga memilih menunda pengobatan hingga kondisi kesehatan memburuk atau mengandalkan pengobatan tradisional yang belum tentu efektif. Dampak yang muncul tidak hanya berupa meningkatnya angka kesakitan, tetapi juga meluas ke masalah gizi buruk dan stunting pada anak akibat infeksi berulang, meningkatnya risiko kematian pada ibu hamil dan lansia karena keterlambatan penanganan, serta menurunnya produktivitas kerja akibat tingginya beban penyakit. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan daya tahan sosial masyarakat di bidang kesehatan, memperselebar kesenjangan akses layanan, dan menghambat upaya peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan.

Strategi Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Perbaikan Layanan dan Pola Hidup Sehat

Upaya mengatasi berbagai permasalahan ketahanan sosial di bidang kesehatan perlu dilakukan secara terpadu, menasar akar penyebab sekaligus memperbaiki sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan masyarakat. Langkah awal yang penting adalah melaksanakan penyuluhan dan bimbingan yang intensif untuk mananamkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga masyarakat tidak hanya memahami pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan World Health Organization (2019) yang menekankan pentingnya edukasi kesehatan berbasis komunitas yang berkesinambungan dan kontekstual terhadap budaya lokal agar perubahan perilaku masyarakat dapat bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu mutlak diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Penyediaan obat-obatan yang memadai serta perbaikan sarana kesehatan, mulai dari fasilitas rawat, peralatan medis, hingga transportasi darurat, terbukti memperkuat sistem layanan kesehatan Masyarakat (UNICEF Indonesia, 2021). Hal ini relevan dengan kebutuhan daerah terpencil seperti Asmat, di mana

hambatan geografis dan terbatasnya distribusi logistik sering kali memperlambat penanganan medis.

Perbaikan sanitasi juga menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan kesehatan. Pengadaan MCK layak, pembangunan saluran pembuangan limbah, serta peningkatan akses air bersih dapat mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan. Selain itu, pemanfaatan apotek hidup atau tanaman obat keluarga merupakan bentuk strategi lokal yang murah, aman, dan mudah dijangkau untuk mendukung ketahanan kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2018).

Dengan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan edukasi, layanan kesehatan formal, perbaikan sanitasi, serta pemanfaatan kearifan lokal, masalah kesehatan yang selama ini menjadi hambatan ketahanan sosial dapat diatasi secara lebih berkelanjutan. Strategi ini juga sejalan dengan kerangka pembangunan sosial yang menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional, bukan hanya dari sisi medis, tetapi juga kesejahteraan sosial secara umum.

Kesenjangan Layanan Komunikasi dan Transportasi antar Kampung di Wilayah Asmat

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan layanan komunikasi dan transportasi di wilayah ini, khususnya di Kampung Amakot, diperlukan langkah-langkah terpadu yang mampu meningkatkan konektivitas dan memperbaiki akses masyarakat terhadap pusat pelayanan publik. Peningkatan sarana komunikasi menjadi prioritas, baik melalui pembangunan infrastruktur jaringan telepon dan internet yang memadai maupun pengadaan perangkat komunikasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Langkah ini akan mempercepat arus informasi, mempermudah koordinasi, serta mendukung aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Penelitian Afrida & Wulandari (2022) menegaskan bahwa konektivitas digital mampu memperkuat pembangunan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga relevan diterapkan dalam konteks Asmat.

Di sisi transportasi, perlu dilakukan pengadaan dan penambahan sarana angkutan yang memadai dari dan menuju Kampung Amakot, baik ke Ibu Kota Distrik maupun ke Ibu Kota Kabupaten. Perbaikan dan penataan trayek transportasi juga menjadi hal penting agar jadwal keberangkatan dan kedatangan lebih jelas, teratur, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Peningkatan infrastruktur penunjang seperti dermaga, jalur perairan, atau jalan akses menuju pusat layanan juga harus diperhatikan demi kelancaran mobilitas. Nasution (2013) menyebutkan bahwa transportasi merupakan prasyarat pembangunan wilayah karena menentukan keterhubungan antarwilayah dan distribusi pelayanan. Dalam konteks Papua, Pradipta & Wafa (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan transportasi menjadi salah satu hambatan serius bagi akses pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat sering terlambat memperoleh penanganan medis. Dengan upaya ini, kesenjangan akses transportasi antara Kampung Amakot dengan kampung-

kampung lain seperti Iwon dan Bundru dapat diperkecil, sehingga seluruh wilayah memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Peningkatan layanan komunikasi dan transportasi tidak hanya akan mempermudah pergerakan orang dan barang, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwilayah, mempercepat respon terhadap keadaan darurat, dan membuka peluang ekonomi baru. Pudjohartono dkk. (2019) menemukan bahwa akses transportasi di Asmat berhubungan erat dengan status gizi dan kesehatan anak, yang menunjukkan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung ketahanan sosial. Lebih lanjut, Riyadi & Purnamasari (2020) menekankan bahwa keterbatasan komunikasi dan transportasi mempersebar ketimpangan pelayanan dasar di Indonesia Timur, termasuk Papua, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat terpencil. Dengan terwujudnya sistem transportasi dan komunikasi yang lebih baik, kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil akan meningkat, ketahanan sosial akan semakin kuat, dan kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi secara signifikan.

Strategi Penguatan Layanan Komunikasi dan Transportasi untuk Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah

Upaya untuk mengatasi masalah layanan komunikasi dan transportasi di wilayah ini perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan tujuan memperkuat konektivitas antarwilayah serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi menjadi langkah awal yang krusial, sehingga masyarakat di daerah terpencil seperti Kampung Amakot dapat menikmati akses komunikasi yang lebih cepat dan andal. Bersamaan dengan itu, pemberian bantuan sarana dan prasarana transportasi, baik berupa armada angkutan air maupun darat, akan memperluas pilihan mobilitas dan mempermudah distribusi barang serta perjalanan masyarakat menuju pusat layanan di tingkat distrik dan kabupaten.

Pengembangan dan perluasan jaringan komunikasi serta transportasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup jalur utama maupun jalur penghubung antar kampung, sehingga kesenjangan akses antarwilayah dapat diperkecil. Peningkatan kualitas sarana transportasi juga perlu diarahkan pada pilihan yang lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga biaya perjalanan tidak menjadi hambatan. Di sisi lain, penyusunan dan pengembangan pengaturan mekanisme angkutan di tingkat distrik dan kabupaten penting dilakukan agar trayek, jadwal, dan sistem operasional transportasi lebih tertata dan efisien.

Langkah ini harus didukung dengan sosialisasi mekanisme pengaturan transportasi secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga masyarakat memahami tata cara dan manfaat sistem yang diterapkan. Selain itu, pengawasan dan penegakan aturan transportasi di tingkat distrik dan

kabupaten perlu dijalankan secara konsisten untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan rasa aman bagi pengguna. Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, pengaturan yang jelas, serta pengawasan yang efektif, layanan komunikasi dan transportasi di wilayah ini akan menjadi lebih terjangkau, merata, dan berdaya guna, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kesenjangan Akses Pendidikan dan Kecakapan Hidup di Wilayah Terpencil

Akses layanan pendidikan dan kecakapan hidup di wilayah ini masih menghadapi tantangan besar yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan fasilitas pendidikan, baik sekolah formal maupun luar sekolah, belum tersedia memadai, bahkan di beberapa kampung sama sekali tidak ada. Hal ini sejalan dengan temuan Rumaseb & Suryono (2019) yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses sekolah di Papua mengakibatkan rendahnya partisipasi anak usia sekolah. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan pendidik atau tutor, sementara tenaga pendidik yang tersedia jumlahnya sangat terbatas dan umumnya ditempatkan di kampung lain. Kesejahteraan para pendidik yang bertugas di luar domisilinya pun tidak memadai, sehingga berdampak pada motivasi dan keberlanjutan layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan Mambri & Kambu (2020) bahwa insentif guru yang rendah di daerah terpencil Papua sering menjadi penghambat kualitas layanan belajar.

Infrastruktur pendukung seperti transportasi, penerangan, dan akses jalan juga belum memadai, sehingga mobilitas tenaga pendidik maupun peserta didik terhambat. Wonda & Lestari (2022) menegaskan bahwa hambatan geografis dan infrastruktur di Papua sangat memengaruhi ketersediaan guru dan kelancaran distribusi sarana pendidikan. Irama kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung disiplin belajar anak didik turut mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Rasio antara tenaga pendidik dan peserta didik pun tidak seimbang, yang berakibat pada rendahnya intensitas bimbingan dan perhatian kepada setiap murid, sesuai temuan E. Supriyanto & Sari (2021) bahwa ketimpangan rasio guru-murid berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pembelajaran di daerah 3T.

Selain itu, terbatasnya fasilitas tempat tinggal bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan di luar kampung membuat banyak anak terpaksa menghentikan pendidikannya setelah jenjang tertentu. Kambuaya & Rumbraver (2023) menekankan bahwa keterbatasan sarana pendukung, termasuk asrama dan dukungan ekonomi keluarga, merupakan faktor utama putus sekolah di Papua.

Keseluruhan permasalahan ini menggambarkan masih rendahnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas, serta terbatasnya peluang pengembangan kecakapan hidup yang diperlukan untuk mendukung kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa

tantangan pendidikan tidak hanya terkait ketersediaan guru atau sarana, tetapi juga erat kaitannya dengan ketahanan sosial dan pembangunan manusia yang berkeadilan di Papua.

Upaya Terpadu Penguatan Layanan Pendidikan dan Kecakapan Hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

Peningkatan akses layanan pendidikan dan pengembangan kecakapan hidup di wilayah ini memerlukan langkah terpadu yang menyentuh seluruh aspek pendukung proses belajar. Upaya pertama yang penting dilakukan adalah pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan, baik untuk sekolah formal maupun luar sekolah, yang mencakup pembangunan gedung sekolah dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Fasilitas pendukung seperti meja dan bangku belajar, meja dan bangku guru, lemari buku dan arsip, alat peraga pembelajaran, buku paket, hingga sarana olahraga perlu disediakan untuk menunjang proses belajar mengajar yang berkualitas.

Selanjutnya, ketersediaan tenaga pendidik harus diperkuat melalui pengadaan atau penambahan guru di sekolah kampung terdekat sesuai kebutuhan, mencakup guru bidang studi agama, mata pelajaran umum, dan olahraga. Kesejahteraan guru yang bertugas di kampung maupun daerah sekitar juga perlu ditingkatkan agar motivasi dan dedikasi mereka tetap terjaga. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja guru, pendidik, dan pendamping belajar berbasis kebutuhan serta kearifan lembaga lokal, sehingga pembelajaran dapat lebih relevan dengan konteks masyarakat.

Selain itu, penting dilakukan penyuluhan, pelayanan, dan bimbingan sosial untuk memotivasi masyarakat dalam mendukung pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan pendekatan berbasis komunitas. Untuk menjamin keberlanjutan pendidikan di kampung-kampung yang hanya memiliki SD kecil, dapat dikembangkan pola pendidikan berasrama bagi siswa SD. Pola ini tidak harus selalu terpusat di ibu kota distrik, tetapi dapat diterapkan pada 3 hingga 4 kampung bertetangga dengan membuka satu SD berasrama di kampung yang memiliki daya dukung memadai, seperti ketersediaan lahan, air bersih, penerangan, dan akses transportasi.

Tak kalah penting, pembangunan asrama bagi pendidik di ibu kota distrik atau kabupaten juga perlu diwujudkan untuk memudahkan mobilitas dan memastikan keberlangsungan tenaga pengajar di wilayah terpencil. Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur pendidikan, penambahan tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan dan kinerja guru, serta penyediaan fasilitas pendukung belajar, diharapkan akses pendidikan dan kecakapan hidup masyarakat akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial dan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial masyarakat Asmat terbentuk melalui keterhubungan erat dengan alam, kearifan lokal, serta solidaritas komunitas, namun pada saat

yang sama menghadapi tantangan serius yang bersifat multidimensional. Ketergantungan pada sistem ekonomi subsisten berbasis hasil hutan dan rawa menjadikan kehidupan masyarakat sangat rentan terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keterbatasan akses pasar. Di sisi lain, rendahnya keterampilan teknis dan terbatasnya sarana produksi memperlemah daya saing dan produktivitas ekonomi. Dari perspektif kesejahteraan sosial, situasi ini menggambarkan adanya deprivasi multidimensional yang tidak hanya berdampak pada ketahanan ekonomi, tetapi juga memperburuk kondisi kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Di bidang kesehatan, masyarakat Asmat masih menghadapi keterbatasan tenaga medis, minimnya fasilitas pengobatan, rendahnya akses terhadap air bersih, serta sanitasi yang belum memadai. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular dan gizi buruk, khususnya pada anak-anak. Di bidang pendidikan, ketidakmerataan fasilitas sekolah, keterbatasan tenaga pengajar, serta sulitnya akses transportasi membuat angka partisipasi sekolah di Asmat jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan berimplikasi langsung pada lemahnya pengembangan kecakapan hidup generasi muda, yang pada akhirnya memperlemah daya saing sumber daya manusia dalam jangka panjang. Kedua bidang ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat Asmat masih menghadapi kesenjangan serius dibanding standar nasional.

Meski demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat Asmat. Strategi diversifikasi penghidupan berbasis potensi lokal, seperti pengembangan budidaya tanaman pangan, peternakan skala kecil, dan perikanan komunitas, dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi kerentanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan sarana komunikasi dan transportasi juga sangat penting untuk membuka keterisolasi wilayah, memperlancar distribusi barang, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Dari perspektif kesejahteraan sosial, upaya ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga proses pemberdayaan masyarakat agar memiliki kapasitas kolektif dalam mengelola sumber daya, mengakses peluang, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menyusun strategi pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan kontekstual dengan kondisi masyarakat adat Asmat. Pembangunan hendaknya menekankan pada penguatan layanan dasar, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bukan sekadar proyek infrastruktur fisik yang sering kali kurang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kebijakan pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan, dengan memastikan pelestarian lingkungan sekaligus pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, ketahanan sosial masyarakat Asmat tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga diperkuat

secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan modernisasi, perubahan iklim, dan dinamika sosial-budaya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>
- Afrida, N., & Wulandari, A. (2022). Peran konektivitas digital dalam memperkuat pembangunan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.21009/jpm.072.02>
- Anggraheni, A., & Prasodjo, T. (2023). Seni Ukir Asmat dan Identitas Budaya: Representasi Manusia Kayu di Papua. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(2), 155–170. <https://doi.org/10.7454/ai.v44i2.155>
- Antaranews.com. (2023, Mei 16). *Kebun Gizi Apung bantu penuhi gizi anak Asmat Papua*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3541734/kebun-gizi-apung-bantu-penuhi-gizi-anak-asmat-papua>
- Antaranews.com. (2025). *Kemensos dirikan 10 peternakan ayam di Kabupaten Asmat*—ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/2519429/kemensos-dirikan-10-peternakan-ayam-di-kabupaten-asmat>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Ellen, R. (2020). *The Cultural Ecology of Human Communities*. Routledge.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method*. Hidayatul Quran Kuningan. <https://books.google.co.id/books?id=Vja4DwAAQBAJ>
- Hikmat, H. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui akses pasar dan jaringan ekonomi lokal. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 145–160.
- Kambuaya, J., & Rumbrawer, F. (2023). Putus Sekolah di Papua: Faktor Penyebab dan Strategi Penanggulangan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 14(2), 145–160.
- Kamma, F. C. (2011). *Koreri: Messianic Movements in the Biak-Numfor Culture Area*. KITLV Press.
- Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and ways forward. *Erdkunde*, 67(1), 5–19. <https://doi.org/10.3112/erdkunde.2013.01.02>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. <https://www.kemkes.go.id>
- Kompas. (2018). *Ketergantungan pada Hasil Alam dan Risiko Gizi Buruk di Asmat*. <https://www.kompas.com/>
- Lestari, N., & Mambri, A. (2022). Transportasi, Biaya Distribusi, dan Integrasi Pasar di Papua. *Jurnal Ekonomi Wilayah dan Pembangunan*, 13(1), 33–47.
- Mambri, A., & Kambu, M. (2020). Insentif Guru dan Mutu Pendidikan di Daerah Terpencil Papua. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 55–68.
- Mboeik, A. (2021). Pembangunan Infrastruktur di Papua: Antara Kebutuhan dan Kepentingan Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(2), 201–215. <https://doi.org/10.20473/jisp.v24i2.2021>
- Nasution, M. N. (2013). *Manajemen Transportasi*. Ghalia Indonesia.

- Nugroho, D., & Wulandari, E. (2021). Capacity building berbasis komunitas dalam penguatan ekonomi lokal. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 8(1), 77–89.
- Pamungkas, C. (2018). Ketahanan Sosial dan Ekologi pada Masyarakat Asmat Papua. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 23(1), 77–95. <https://doi.org/10.7454/mjs.v23i1.11538>
- Pradipta, A. Y., & Wafa, A. (2023). Kesenjangan akses layanan kesehatan di Papua: Tantangan geografis dan solusi transportasi. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(1), 45–57. <https://doi.org/10.7454/jkki.v12i1.2023>
- Pudjohartono, M. F., Suryani, N., & Yuliana, D. (2019). Dampak keterbatasan transportasi terhadap status gizi dan kesehatan anak di Kabupaten Asmat, Papua. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 210–219. <https://doi.org/10.15294/jgkm.v11i3.2019>
- Rachman, H. P. S., Suryana, A., & Ariani, M. (2020). Diversifikasi pangan lokal sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 15(2), 85–96.
- ResearchGate. (2018). *Papuan Subsistence Economy and Its Challenges*. <https://www.researchgate.net/>
- Riyadi, B., & Purnamasari, D. (2020). Ketimpangan pelayanan dasar di Indonesia Timur: Studi kasus Papua dan Maluku. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 87–101. <https://doi.org/10.20473/japi.v6i2.2020>
- Rumaseb, Y., & Suryono, Y. (2019). Akses Pendidikan di Papua: Tantangan dan Realitas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 101–115.
- Rumatora, M. (2021). Keterbatasan Sarana Produksi dan Stagnasi Ekonomi Rumah Tangga di Papua. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(3), 201–215.
- Rumbewas, M., & Handoyo, R. (2020). Sagu sebagai Ketahanan Pangan dan Tantangan Ekonomi di Papua. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.145>
- Soewondo, P. (2021). Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua dalam Perspektif Layanan Dasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 45–56.
- Sumardjo, & Sadono, D. (2019). Peternakan rakyat sebagai basis pemberdayaan sosial-ekonomi komunitas pedesaan. *Jurnal Penyuluhan*, 15(1), 10–22.
- Supriyanto, B. (2018). Ekologi sosial dan kesejahteraan masyarakat: Integrasi sumber daya alam dengan penghidupan lokal. *Jurnal Sosio Ekologi*, 6(2), 101–115.
- Supriyanto, E., & Sari, D. (2021). Ketimpangan Rasio Guru-Murid di Daerah 3T dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(1), 77–90.
- Susanti, R. (2020). Kesenjangan Pendidikan di Tanah Papua: Analisis Angka Partisipasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 310–325.
- Susanti, R., & Kurniawan, A. (2020). Tantangan Pembangunan Ekonomi di Daerah 3T: Analisis Kapasitas Pendidikan dan Keterampilan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 55–70.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Laporan Akses Air Minum dan Sanitasi di Papua*. <https://www.unicef.org/indonesia>
- Wambrauw, J., & Suharno, S. (2019). Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Subsisten di Papua dalam Menghadapi Perubahan Ekosistem. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(2), 87–99.
- Widjojo, M. S. (2013). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Yayasan Obor Indonesia.
- Wikipedia. (t.t.). *Suku Asmat*. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Asmat

- Wonda, P., & Lestari, N. (2022). Geografi, Infrastruktur, dan Kualitas Layanan Pendidikan di Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 233–247.
- World Health Organization. (2018). *Environmental health and sanitation improvement strategies*. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2019). *Community-based health promotion and cultural adaptation in health education*. <https://www.who.int>
- Yoman, S. S. Y. (2019). *Suara Hati Rakyat Papua*. Deiyai Publisher.